



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai - Makassar
Telepon (0411) 590591 - 590592, Faksimile (0411) 590595
Email : sulsel@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-1633/PW21/6/2020 tanggal 2 bulan September tahun 2020, kami telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana aksi kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 2 September 2020
Kepala Perwakilan, 



Aman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

RENCANA AKSI KEMERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PKC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BIDANG IPP																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rupiah (Juta)	850	36	240	256	320	1	Pengawasan atas Hasil Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Sedang	23.670.000	IPP	PP	2			
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	4	-	-	1	3	2	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP	Sedang	13.080.000	IPP	PP				1
3		Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	1	-	-	-	1	3	Pengawasan atas Kinerja Program Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PISEW)	Tinggi	13.080.000	IPP	PP				1
4		Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	1	-	-	-	1	4	Pengawasan atas Program/ Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Sedang	300.840.000	IPP	PP				23
5		Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	4	-	-	-	4	5	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol Bendungan dan Perumahan)	Sedang	116.500.000	IPP	PP		5		5
6		Jumlah Program Prioritas Strategis tercapai sesuai target	Program Prioritas Strategis	4	-	-	-	4	6	Pengawasan atas Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Perhubungan (Kereta Api, Pelabuhan, Bandara)	Sedang	23.300.000	IPP	PP		1		1
									7	Pengawasan atas Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pemerataan Ekonomi (TORA dan Sertifikasi Lahan)	Sedang	46.600.000	IPP	PP		2		2
									8	Pengawasan atas Tunggalan Pembayaran Tahun Sebelumnya Diatas 2 milyar	Tinggi	12.560.000	IPP	PP				1
									9	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	Sedang	57.770.000	IPP	PP		2		2
									10	Pengawasan Intern atas Program Strategis Nasional-Kegiatan Perhutanan Sosial	Tinggi	25.100.000	IPP	PP			2	
									11	Pengawasan Intern atas Proyek Strategis Nasional-Kepuasan Paramajon Perkebunan Rakyat	Tinggi	25.100.000	IPP	PP		2		
									12	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Sedang	15.335.000	IPP	PP				1
									13	Pengawasan Tata Kelola Kegiatan Tanah Obyek Reform Agraria (TORA) KLHK	Tinggi	16.610.000	IPP	PP			2	
									14	Pengawasan Lintas Sektorial Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Sedang	11.650.000	IPP	PP				1
									15	Pengawasan Lintas Sektorial atas Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Rur dan Industrialisasi	Sedang	17.850.000	IPP	PP				1
									16	Pengawasan Lintas Sektorial atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	Sedang	21.900.000	IPP	PP				1
									17	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Tinggi	13.080.000	IPP	PP				1
									18	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT)	Tinggi	13.080.000	IPP	PP				1
									19	Pengawasan Lintas Sektorial atas Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	Sedang	10.275.000	IPP	PP				1

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4										
BIDANG AKUNTAN NEGARA																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	BUMD	9				9		1. Pengawasan atas Akuntabilitas, Tata Kelola, Kapabilitas SPI dan SIA BLUD pada BLU dan BLUD	Sedang	11.510.000	AN	PP				1
2										2. Pengawasan atas Capaian Penugasan Presiden Program 35.000 MW	Sedang	12.240.000	AN	PP			1	
3										3. Pengawasan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada BLU dan BLUD	Sedang	16.700.000	AN	PP				1
4										4. Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi	Sedang	41.050.000	AN	PP		2		1
5										5. Pengawasan terhadap penanggulangan dan Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Pembayaran klaim rumah sakit yang menangan COVID-19	Tinggi	235.000.000	AN	PP				5
6										6. Pengawasan terhadap Penanggulangan dan Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Penyaluran Insentif Tenaga Medis Pusat dan Daerah serta Penyaluran	Tinggi	312.560.000	AN	PP				10
7										7. Pengawasan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi - Pengawasan atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Korporasi Bidang Usaha Agribisnis, Infrastruktur dan Perdagangan	Sedang	34.300.000	AN	PP				1
8										8. Pengawasan atas Peran BUMD Jasa Air dalam Mendukung Perluasan Infrastruktur Dasar - Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman	Sedang	334.090.000	AN	PP				22
9										9. Pengawasan atas Peran BUM Desa dalam Mendukung Penguatan Kemiskinan dan Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Sedang	11.510.000	AN	PP				1
10										10. Pengawasan Peran Badan Usaha Agribisnis dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan - Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Tata Kelola Sistem Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	Sedang	21.670.000	AN	PP				1
11										11. Pengawasan atas tata kelola PSN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Pengutamaan Pengembangan EBT	Sedang	24.480.000	AN	PP		1		1
										12. Pengawasan terhadap Peran Badan Usaha dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Kegiatan Peningkatan Produksi Pangan	Sedang	12.240.000	AN	PP			1	
										13. Pengawasan terhadap Peran Badan Usaha dalam Mendukung Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Kegiatan Peningkatan	Sedang	3.300.000	AN	PP				1
BIDANG INVESTIGASI																		
1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	273	68	68	68	69		1. Pengawasan Kewenangan terkait program prioritas peningkatan konektivitas multi moda dan antar moda mendukung pertumbuhan ekonomi	Rendah	16.840.000	INVESTIGASI	PP				1
2		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124	6.781	6.781	6.781	6.781		2. Pengawasan kewenangan terkait program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Rendah	16.840.000	INVESTIGASI	PP				1
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75%			25%	75%		3. Pengawasan kewenangan atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Instansi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah (Audit Penyelidikan Harga/Klaim)	Sedang	16.840.000	INVESTIGASI	PP			1	

